



# Dirkrimsus Tangani Masjid Agung Putussibau

**PUTUSSIBAU, SP** - Pemerintah Daerah (Pemda) Kapuas Hulu telah memberikan dana hibah sampai belasan miliar untuk pembangunan Masjid Agung Darunnajah Putussibau, Kabupaten Kapuas Hulu, sejak tahun 2012. Namun, sampai saat ini pembangunan tersebut belum terselesaikan.

Bahkan, proses pembangunan tersebut diduga terjadi

Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Saat ini, Polda Kalbar sedang melakukan penyelidikan terkait kasus tersebut. Kapolres Kapuas Hulu, AKBP Imam Riyadi membenarkan informasi tersebut. Menurutnya, sudah ada yang diperiksa dalam kasus tersebut. Hanya saja, dia enggan membeberkannya secara rinci, lantaran kasus tersebut sudah

menjadi ranah Polda Kalbar. "Sudah Mas infonya. Kayaknya yang pas minta ke Krimsus saja Mas," ujarnya. Sementara, Direktur Kriminal Khusus (Dirkrimsus) Polda Kalbar, AKBP Mahyudi Nazriansyah membenarkan dugaan Tipikor pembangunan Masjid Agung Darunnajah Putussibau, saat ini sudah ditangani oleh pihaknya.

• Baca Halaman 7

Bantuan Pemda Kapuas Hulu untuk pembangunan masjid	
Tahun 2012	Rp 2 miliar
Tahun 2013	Rp 4,5 miliar
Tahun 2014	Rp 2 miliar
Tahun 2015	Rp 3,95 miliar
Tahun 2016	tidak ada bantuan
Tahun 2017	Rp 2 miliar

**AKBP Mahyudi Nazriansyah**  
Dirkrimsus Polda Kalbar



Untuk kasus tersebut masih dalam proses penyelidikan.



**Iwan Setiawan**  
Kabag Kesra Setda Kapuas Hulu

Untuk kepengurusan pembangunan masjid tersebut pada tahun 2012-2015, Ketua Pelaksananya Nasir, dan Bendaharanya Wantaufiurrahman. Untuk panitia pembangunan tahun 2017, dijabat oleh Zainuddin





## Hal 1 ■ dirkrimsus tangani

“Untuk kasus tersebut masih dalam proses penyelidikan,” katanya, Minggu (3/12) siang.

Dia menerangkan, saat ini pihaknya masih mencari dan mengumpulkan bukti-bukti terkait kasus dugaan Tipikor Masjid Agung Darunnajah Putussibau tersebut, untuk bisa ditindaklanjuti. “Kita masih mencari dan mengumpulkan bukti-bukti,” imbuhnya.

Mengenai jumlah saksi yang sudah diperiksa dan kemungkinan kerugian yang diakibatkan, Mahyudi menuturkan bahwa, saat ini masih dalam tahap penyelidikan dan belum sampai pada tahap sidang.

Saat ditanya, apakah Dirkrimsus sudah memanggil Wakil Ketua DPRD Kapuas Hulu untuk dimintai keterangan terkait kasus tersebut, Mahyudi enggan menjawab.

Dia menegaskan, pihaknya masih terus melakukan penyelidikan.

Kepala Bidang Humas Polda Kalbar, AKBP Nanang Purnomo mengatakan, terkait kasus dugaan Tipikor Masjid Agung Darunnajah, Putussibau, Kabupaten Kapuas Hulu saat ini masih dalam tahap Lidik.

“Kami belum ada pemanggilan, masih Lidik,” katanya.

Dia menyatakan, kasus tersebut belum ada pelaporan, melainkan masih adanya dugaan tindak pidana korupsi, dan saat ini masih dilakukan penyelidikan.

*Suara Pemred* juga melakukan konfirmasi terkait hal tersebut kepada panitia pembangunan masjid yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Kapuas Hulu (Kader Partai Golkar), Wantufiqurahman.

Dia juga belum dapat memberikan keterangan, mengingat sedang berada di

luar daerah. “Saya lagi di Gorontalo, sedang melihat mertua yang masuk rumah sakit,” katanya, belum lama ini.

### Panitia Bermasalah

Proyek Masjid Agung Darunnajah Putussibau diduga bermasalah. Proyek pembangunan masjid dilakukan bertahap. Terkait persoalan tersebut, *Suara Pemred* mengonfirmasi ke pihak Kejari Kapuas Hulu. Tapi berdasarkan keterangan pihak Kejari, belum menerima adanya laporan terkait dugaan korupsi tersebut.

“Sampai saat ini belum ada laporan masuk ke saya,” kata Kasi Pidsus Kejari Kapuas Hulu, Ricki Panggabean, Senin (20/11).

Ricki menerangkan, sesuai mekanisme pelaporannya, masuk ke Kasi Intel Kejari, kemudian penelaahan apakah ada unsur Tipikor atau tidak, jika ada dikumpulkan data dan keterangan.

“Jika tidak lengkap akan dilakukan pemeriksaan dan dimintai keterangan pihak terkait,” terangnya.

Dia menjelaskan, untuk penanganan kasus korupsi batas waktunya telah ditentukan sesuai SOP yang ada. Di mana untuk penyidikan dilakukan selama 30 hari, dan diperpanjang selama 30 hari, selanjutnya ditetapkan sebagai tersangka.

“Selanjutnya diserahkan ke jaksa, untuk melakukan penelitian dan menentukan kelengkapan berkas,” katanya.

Untuk kendala yang dihadapi, pihaknya dalam penanganan kasus Tipikor, terkait perhitungan kerugian negara, proses surat ke BPK, selanjutnya menunggu balasan BPK, kemudian BPK mengundang melakukan ekspose.

“Jika ada kekurangan akan dilakukan pemeriksaan ulang

dari pihak terkait,” terangnya.

Ditambahkannya, untuk sanksinya biasanya dikenakan Undang-undang Tipikor Pasal 2 dan 3 dengan ancamannya, untuk Pasal 2 sanksinya empat sampai 20 tahun penjara dan Pasal 3, sanksinya satu sampai 20 tahun penjara.

Seperti diketahui, masjid ini dibangun tahun 2008. Namun sampai sekarang, masjid yang berada di Jalan Kom Yos Soedarso, Kelurahan Putussibau Kota ini, tak kunjung selesai.

Sementara tiap tahun masjid ini selalu menerima dana hibah dari Pemkab Kapuas Hulu, nilainya mencapai miliaran. Tak ayal pembangunannya pun mengundang pertanyaan di kalangan masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu, telah memberikan dana hibah untuk pembangunan Masjid Agung Darunnajah Putussibau sebesar Rp12,45 miliar.

### Bantuan Pemda

Kabag Kesra Setda Kapuas Hulu, Iwan Setiawan menjelaskan, anggaran yang diberikan tersebut secara bertahap mulai dari tahun 2012 sampai 2015.

“Yang dibilang ada dugaan permasalahan itu dari tahun 2012 sampai 2015,” terangnya.

Untuk bantuan tahun 2017 ini Rp2 miliar, namun pembangunannya telah dilaksanakan oleh panitia yang baru.

Ditergaskannya, dirinya tidak mengetahui jika saat ini sudah ada pihak yang diperiksa di Polda Kalbar, terkait kasus tersebut.

“Menurut saya, dana tersebut kalau kita lihat kenyataan yang sudah dibangun sangat signifikan dengan kenyataan di lapangan, atau pembangunan masjid tersebut,” tuturnya.

Dijelaskannya, dirinya baru menjabat sebagai Kabag

Kesra. Sebelumnya, jabatan tersebut dijabat oleh Istiwa, sehingga untuk bantuan dana hibah dari tahun 2012-2015, bukan pada saat kepemimpinannya.

“Untuk kepengurusan pembangunan masjid tersebut pada tahun 2012-2015, Ketua Pelaksananya Nasir, dan Bendaharanya Wantaufiqurahman. Untuk panitia pembangunan tahun 2017, dijabat oleh Zainuddin,” jelasnya.

Diterangkannya, khusus bantuan hibah tahun 2017, dikeluarkan dalam masa kepemimpinannya. Dimana persyaratannya harus menggunakan lembaga, dan pengurus masjid yang memiliki identitas jelas, dengan ditandai dengan adanya akta notaris (berbadan hukum).

“Khusus untuk bantuan hibah tahun 2017, saya sudah minta ke mereka agar proposal awal sampai akhir, dan pelaksanaan pengerjaannya agar sesuai,” terangnya.

Ia berharap, kedepan pengawasan pelaksanaan pembangunan dan administrasinya harus lebih akurat lagi, untuk menghindari permasalahan di kemudian hari.

Sementara, Wakil Bupati Kapuas Hulu, Antonius L. Ain Pamero ketika diminta pendapatnya berharap, pembangunan Masjid Agung Darunnajah Putussibau dapat segera selesai.

“Terkait masalah teknis itu Kesra yang menanganinya,” katanya singkat.

Ditambahkannya, terkait teknis pembangunan masjid tersebut, tentunya ada prosedur yang ditempuh mulai dari proses pengerjaan sampai proses pengelolaan pendanaannya.

“Kita berharap pembangunan masjid itu dapat segera terselesaikan,” harapnya. (aan/sap/lis)